



Santunan Kematian Berlanjut

Mekanisme Penyaluran dengan Asuransi

Abdul Hamied Razak

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan DPRD Kota Jogja menyepakati keberlanjutan program santunan kematian bagi warga. Hanya, mekanisme penyaluran dana tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Sujanarko menjelaskan, pihaknya menginginkan agar santunan kematian bagi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu program pemerintah tetap dilanjutkan. Hanya, pola penyaluran dan mekanismenya diubah agar tidak melanggar Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial.

Dari hasil rapat kerja Komisi D DPRD dengan Pemkot Jogja, Rabu

(6/6), muncul dua pola mekanisme penyaluran yang bisa dilakukan. Pertama, dilakukan secara swakelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan kedua opsi penyaluran santunan kematian dengan pola asuransi yang diserahkan kepada pihak ketiga.

"Dari kedua opsi tersebut, mekanisme penyaluran dengan asuransi kematian dinilai lebih baik dibandingkan dengan opsi penyaluran lewat SKPD. Karena, hal itu bertentangan dengan Permendagri No. 32/2011," ungkapnya sisela-sela Raker di Komisi D DPRD Kota Jogja, kemarin.

Anggota Komisi D Ardianto mengatakan, bila mekanisme penyaluran menggunakan UPT/BLUD maka program banyak mengalami kesulitannya, termasuk bertentangan dengan peraturan di atasnya. Namun, bila opsi asuransi yang diambil, maka seluruh masyarakat bisa di-cover program.

Politisi asal Partai Keadilan Se-

jahtera (PKS) ini mengatakan, yang meninggal mulai Januari 2012 hingga penghentian santunan kematian akhir Mei kemarin tetap dimasukkan di skema asuransi sebelum APBD Perubahan di tetapkan. Dengan demikian, 995 warga yang mengajukan santunan kematian sebelumnya, diharapkan tetap bisa mengklaim asuransi kematian.

"Jadi, tidak hanya warga miskin. Mekanisme asuransi melalui belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan bisa dilakukan dan seluruh penduduk diasuransikan termasuk yang meninggal nanti tinggal diklaimkan," ujarnya.

Secara pribadi, dia mengusulkan agar dana asuransi lewat APBD Perubahan bisa ditambah. Jika selama ini hanya mendapat Rp600.000 per orang, dia mengusulkan direvisi jadi Rp1,5 juta. "Itu usulan pribadi saya. Sebab, biaya penguburan jenazah untuk Jogja saat ini lebih dari Rp2 juta," ujarnya. (hamied@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 08 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005